

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
SATKER BPS PROVINSI JAMBI
PERIODE LAPORAN LHKPN 2024

No.	Jabatan	Nama	Laporan LHKPN	Keterangan
1	Kepala BPS Provinsi (Kuasa Pengguna Anggaran)	Agus Sudibyo, M.Stat	Sudah	Bukti Terlampir
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Gafur, S.ST, M.Si	Sudah	Bukti Terlampir
3	Bendahara	Marniala Larasati Situmorang, A.Md.Kb.N.	Sudah	Bukti Terlampir
4	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	Sunandar, SE, M.Si	Sudah	Bukti Terlampir
5	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	Diyas Marliyanda, SE	Sudah	Bukti Terlampir
6	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	Della Ayu Syafila, S.E.	Sudah	Bukti Terlampir

Jambi, 10 Maret 2025
Mengetahui
Kepala BPS Provinsi Jambi


Agus Sudibyo, M.Stat



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : AGUS SUDIBYO
- Jabatan** : KEPALA
- NHK** : 412080

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	480.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/70 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	66.000.000
Sub Total	Rp.	564.000.000
III. HUTANG	Rp.	129.017.871
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	434.982.129

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GAFUR
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 459043

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	710.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	122.500.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. MOTOR, HONDA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	470.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	47.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.349.500.000
III. HUTANG	Rp.	331.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.018.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARNIALA LARASATI SITUMORANG
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 953021

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.134.082
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.989
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	40.262.071

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 40.262.071

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUNANDAR
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 446687

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **560.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/75 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/60 m2 di KAB / KOTA BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 254.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **37.650.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA WIN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 650.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER KF 83 LONG BENSIN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **2.350.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **4.585.463**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**



Sub Total	Rp.	604.585.463
III. HUTANG	Rp.	274.271.911
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	330.313.552

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIYAS MARLIYANDA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 629451

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	360.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 360.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	153.500.000
1. MOTOR, SUZUKI NEX II Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.050.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.883.943
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	546.433.943
III. HUTANG	Rp.	266.343.293
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	280.090.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DELLA AYU SYAFILA
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 950894

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	147.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	12.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.810.233
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	167.410.233
III. HUTANG	Rp.	111.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	56.410.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.